

**Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik
(Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)**

*The Effect of Council Knowledge About Budgeting On The Budget Supervision of Territory with Moderating Variable Organizational Commitment, Public Accountability, and Transparency of Public Policies
(Empirical Study On Local Legislators Blitar The Period of 2014-2019)*

Desy Dwi Permatasari, Kartika
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email : desydpermatasari@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik. Objek penelitian ini yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Blitar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar yang berjumlah 75 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dari total populasi, sebanyak 47 orang yang dijadikan sebagai responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden. Dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Terdapat beberapa hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : Pengetahuan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik.

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of knowledge about the budget of the supervisory board of city and county finances are moderated by the organizational commitment, public accountability, and transparency of public policies. Object of this study are members of the Regional Representatives City and County Blitar. The population in this study were all members of Parliament City and County Blitar consisting of 75 people. Sampling using purposive sampling method, so that the total population of as many as 47 people who serve as respondents to answer the questions contained in the questionnaire. Data collection techniques in this study using questionnaires distributed directly to the respondent. And the method of data analysis used is multiple linear regression with SPSS.

There are some results that can be concluded in this study that the results of testing the first hypothesis, namely knowledge about the council budget affects the area of financial control. Results of testing the second hypothesis that organizational commitment affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. The results of testing the third hypothesis that public accountability has no effect on the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. The results of testing the fourth hypothesis that transparency of public policies affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area.

Keyword : Knowledge About The Budget Council, Regional Finance Controller, Organizational Commitment, Public Accountability, Transparency of Public Policies.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak sejak terjadinya reformasi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah (Halim, 2007:1). Yang kemudian kedua Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut yang menjadi awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ulum, 2009:130). Otonomi daerah ini menjadikan daerah-daerah otonom di Indonesia memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengawasan terhadap keuangan daerahnya masing-masing.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Baswir dalam Ulum, 2009:129).

Menurut Ulum (2009:129), pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Definisi dari pengawasan keuangan negara ini tidak jauh berbeda dengan definisi dari pengawasan keuangan daerah, hanya saja pengawasan keuangan daerah dilakukan pada keuangan daerah yang sedang dikelola.

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membuktikan seberapa penting komitmen organisasi bagi anggota dewan.

Peranan akuntabilitas publik dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena akuntabilitas publik akan memberikan bukti atas pertanggungjawaban anggota dewan terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari dana masyarakat.

Pertanggungjawaban inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Sehingga penelitian ini ingin membuktikan seberapa besar pengawasan anggota dewan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Transparansi merupakan hal hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai anggaran yang telah dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap anggota dewan legislatif. Oleh sebab itu penelitian ini akan membuktikan seberapa penting transparansi bagi masyarakat.

Penelitian sejenis diantaranya telah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007) dan Pramita dan Andriyani (2010). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan. Untuk variabel transparansi kebijakan publik, hasil penelitian Isma (2007) menunjukkan hubungan positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah sedangkan penelitian Sopanah dan Mardiasmo serta Pramita dan Andriyani menunjukkan sebaliknya, bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang dijawab langsung oleh responden terhadap kuesioner yang dibagikan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung dan menjemput langsung kepada responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan kategori skor :

1. Kategori Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Kategori Setuju (S) skor 4
3. Kategori Tidak Tahu (TT) skor 3
4. Kategori Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar yang berjumlah 75 orang. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan ketentuan anggota dewan yang tergabung dalam Komisi II dan Badan Anggaran berjumlah 47 orang.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif,

Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas dan pengujian hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linear Berganda, Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t.

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Setelah dilakukan Uji Validitas, seluruh *item* pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian ini memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,312) yang menunjukkan bahwa seluruh *item* pertanyaan dalam penelitian ini sah atau valid.

Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan Uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, yang diaplikasikan dengan *SPSSver.16 for Windows*, diketahui bahwa nilai *chronbach's Alpha* dalam penelitian ini $> 0,60$, maka kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan Reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan Uji Asumsi klasik yakni Uji Normalitas, Uji Multikoloniaritas, dan Uji Heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah asumsi klasik pada penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari hasil Uji F, diperoleh nilai angka Signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 (Sig. $< 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Pengetahuan Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik adalah model yang layak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) *Adjusted* sebesar 0,456 atau 45,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 45,6% variabel Pengawasan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik dan sisanya yaitu 54,4% (100% - 45,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan.

Analisis Regresi Linear berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka model regresi layak sebagai alat untuk mendeteksi hubungan antar variabel yang diajukan, yaitu Pengetahuan Anggaran (X1), Komitmen Organisasi (X2), Akuntabilitas Publik (X3), Transparansi Kebijakan Publik (X4), dan Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Rekapitulasi hasil Analisis Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig.
Konstanta	27,049	5.181	0,000
X1	0,307	1.714	0,036
X1_X2	0,210	2.100	0,021
X1_X3	0,005	1.647	0,109
X1_X4	0,015	1.347	0,187

Sumber : Output SPSS 16, 2015.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 27,049 - 0,307 X1 + 0,21 X1_X2 + e$$

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai signifikansi $< 5\%$ (α). Secara umum, ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan Uji t dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1	0,307	Signifikan
X1_X2	0,210	Signifikan
X1_X3	0,005	Tidak Signifikan
X1_X4	0,015	Tidak Signifikan

Sumber : Output SPSS 16, 2015.

Pembahasan

Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama (H_1) dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,036. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat (H_1 diterima).

Menurut Jualiastuti (2013), dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah dan

sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat dibutuhkan karena merupakan kompetensi (pengetahuan, kemampuan dan *skill*) anggota dewan dalam menyusun anggaran, mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007), Pramita dan Andriani (2010), Kuddy (2012), dan Juliastuti (2013) yang menunjukkan hubungan signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama (H_2) dapat dilihat pada tabel 2 komitmen organisasi berperan sebagai variabel *moderating* dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,021. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif, artinya semakin tinggi komitmen organisasi maka akan memberi efek menambah pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (H_2 diterima).

Menurut Pramita dan Andriyani (2010), dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal yang lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Pramita dan Andriyani, 2010).

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena pada dasarnya komitmen organisasi yang muncul bukan hanya kesetiaan organisasi tetapi merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Sehingga anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuannya untuk melaksanakan pengawasan secara maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pramita dan Andriyani (2010) yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara interaksi komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga (H_3) dapat dilihat pada tabel 2 akuntabilitas publik tidak berperan sebagai variabel *moderating* dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,109. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (H_3 ditolak).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Isma (2007) dan Andriyani (2010) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, karena ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas yang baik sehingga dapat menyebabkan penyimpangan tata kelola keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti (2013) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Juliastuti (2013) juga menyatakan bahwa akuntabilitas hanya terbatas pada pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal tersebut tidak memberikan pengaruh anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga (H_4) dapat dilihat pada tabel 2 ransparansi kebijakan publik tidak berperan sebagai variabel *moderating* dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,187. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (H_4 ditolak).

Hal ini tidak sesuai dan tidak mendukung penelitian Isma (2007) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran karena keterbukaan informasi masih kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Pramita dan Andriyani

(2010), Kuddy (2012), dan Juliastuti (2013) yang menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Pramita dan Andriyani (2010) juga menyatakan bahwa kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Akses terhadap informasi sektor publik dipengaruhi oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), akan tetapi SIKD di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerah setempat memajukan SIKD.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap keuangan daerah. Anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah harus memiliki pengetahuan tentang anggaran untuk dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran yang terjadi. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka anggota dewan akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hanya mampu dibaca dan dipahami oleh masyarakat tertentu. Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Akses terhadap transparansi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya terbatas pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar, sehingga belum terlihat secara menyeluruh aspek pengawasan keuangan daerah. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel menjadi se-Karesidenan Kediri.
2. Penelitian ini merupakan metode purposive sampling dengan menggunakan instrumen kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengumpulkan data yang

dilengkapi dengan menggunakan wawancara atau pertanyaan lisan agar data yang diperoleh lebih terinci dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Juliastuti, Ayu. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Kuddy, Apriyanto La'ang. 2012. *Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Nordiwawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Pramita, D. Y., dan Andriyani, L. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Ulum, Ilhyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.